

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA KECOMBERAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON**

**Okky Pancawati, Moh. Taufik Hidayat, RM. Haryo Bharoto**  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unswagati Cirebon  
Jl. Terusan Pemuda No. 1.A Cirebon, Telp (0231) 488926  
Email: [haryo.bharoto81@gmail.com](mailto:haryo.bharoto81@gmail.com)



DOI: 10.33603/reformasi.v6i2.10965

Diterima: Februari 2022; Direvisi: Maret 2022; Dipublikasikan: April 2022

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keterlibatan Komunitas dalam Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon” Di Desa Kecomberan, penduduknya sudah terlibat dalam program keluarga berencana yang ada, namun partisipasinya masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program tersebut, kemudian adanya kepercayaan tertentu dalam masyarakat, serta pola pikir yang menyatakan bahwa memiliki banyak anak berarti rezeki yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Metodologi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum kondisi serta situasi yang ada di masyarakat. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup studi literatur, observasi, wawancara, serta dokumentasi yang meliputi foto dan rekaman. Untuk memvalidasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yang bertujuan untuk membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan dari informasi yang diperoleh melalui berbagai waktu dan metode dalam penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Kepala Desa dan Kepala UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kecamatan Talun telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui petugas maupun bidan desa dengan cara sosialisasi atau penyuluhan tentang program keluarga berencana, meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, diperlukan teori dari Bintoro Tjokroamidjojo, yang mencakup tiga elemen penting yaitu (1) Isu Kepemimpinan, (2) Komunikasi, dan (3) Pendidikan..

Kata Kunci : Partisipasi, Program Keluarga Berencana, Desa Kecomberan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan serta perubahan yang telah direncanakan oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam konteks pembangunan negara. Dengan adanya pembangunan di area tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melakukan perbaikan secara bertahap dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas individu atau masyarakat secara bertahap.

Pembangunan ini dapat terbagi menjadi pembangunan nasional maupun daerah, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sedangkan pembangunan daerah juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, peran pemerintah daerah sangat penting, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketentraman bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah:

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan umum dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari kualitas hidup penduduk dan kualitas keluarga agar dapat tumbuh menjadi masyarakat yang lebih maju dan baik. Dalam upayanya untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam program pembangunan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu program yang ada adalah program keluarga berencana (KB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, berikut adalah penjelasan mengenai pengertian Keluarga Berencana (KB):

Keluarga Berencana merupakan upaya untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak kelahiran, serta usia yang tepat untuk melahirkan. Ini juga mencakup pengelolaan kehamilan melalui informasi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi demi terciptanya keluarga yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana (KB) diinisiasi sebagai usaha pemerintah dalam menciptakan individu yang berkualitas, karena program tersebut bertujuan untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi.

Dalam penerapan Program Keluarga Berencana (KB), partisipasi masyarakat sangatlah penting dan harus terlibat dalam seluruh prosesnya. Aprillia Theresia (2015: 196) menjelaskan partisipasi sebagai berikut: "Partisipasi adalah keterlibatan individu atau sekelompok masyarakat dalam suatu aktivitas."

Partisipasi memiliki peranan yang krusial, bahkan menjadi salah satu target dalam program Keluarga Berencana itu sendiri. Hal ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan Program Keluarga Berencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagai aktor utama, masyarakat

diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengembangan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana harus dimulai dari tingkat desa. Desa sebagai entitas masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan/atau tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di tingkat desa, sangat penting untuk memiliki pemerintah desa yang dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang program tersebut kepada masyarakat, agar program ini dapat berjalan efektif dalam mencapai kesejahteraan.

Kecamatan Talun terdiri dari sebelas desa, salah satunya adalah Desa Kecomberan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Desa Kecomberan memiliki partisipasi penduduk dalam program Keluarga Berencana yang telah berjalan namun belum mencapai optimal. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya program tersebut, adanya kepercayaan tertentu yang menganggap program Keluarga Berencana sebagai haram, serta pola pikir bahwa semakin banyak anak berarti semakin banyak rezeki. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang enggan menggunakan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana, khususnya dalam bentuk MOW. Dari berbagai jenis kontrasepsi, seperti suntik dan pil, penggunaan MOW masih tergolong paling rendah.

Penggunaan alat kontrasepsi tercantum dalam tabel tentang Catatan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB dan Bukan Peserta KB di Desa Kecomberan pada bulan Februari dan Maret 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Catatan PUS Peserta KB dan PUS Bukan Peserta KB Desa Kecomberan**

Macam Peserta	Keterangan	Bulan		Jumlah	
		Februari	Maret		
Peserta Aktif	Jumlah PUS	1379	1383	2762	
	IUD	P	36	36	72
		S	44	44	88
	MOW	P	14	14	28
		S	37	37	74
	MOP	P	2	2	4
		S	0	0	0
	Kondom	P	11	11	22
		S	20	20	40
	Implan	P	30	32	62
		S	0	0	0
	Suntik	P	326	328	654
		S	258	258	516
	Pil	P	73	73	146
		S	94	94	188
	Jumlah	P	492	496	988
		S	453	453	906
<b>Total</b>		<b>945</b>	<b>949</b>	<b>1894</b>	
Bukan Peserta KB	Hamil	74	73	147	
	IAS	161	161	322	
	IAD	61	62	123	
	TIAL	138	138	276	
	<b>Total</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>868</b>	

Sumber : UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun Bulan Februari – Maret 2018

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”.

### Rumusan Masalah

Pengamatan sementara ini memiliki batasan atau fokus penelitian, yaitu membahas tentang partisipasi masyarakat dan tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Selanjutnya, untuk penelitian yang akan datang, dirumuskan masalah atau pernyataan masalah sebagai berikut: “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon belum mencapai tingkat optimal. ”

### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
3. Tindakan apa yang diambil untuk mengatasi kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai partisipasi masyarakat.
2. Kegunaan praktis, hasil dari pengamatan sementara ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan partisipasi dan upaya program keluarga berencana

(KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

### TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Aprillia Theresia (2015: 196), partisipasi adalah keterlibatan individu atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan Bintoro Tjokroamidjojo (1995: 226), ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi, antara lain:

1. Masalah kepemimpinan, yang merupakan faktor utama dalam proses pengendalian usaha pembangunan, ditentukan oleh adanya dan kualitas kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan berperan penting dalam menentukan apakah suatu proses pembangunan dapat berhasil atau tidak.
2. Komunikasi, di sisi lain, adalah aspek yang mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan untuk meningkatkan partisipasi. Ide-ide, kebijakan, dan rencana hanya akan memperoleh dukungan jika mereka dipahami dengan baik. Aspek-aspek ini mencerminkan sebagian atau keseluruhan kepentingan dan harapan masyarakat. Kemudian, masyarakat harus memahami bahwa hasil dari kebijakan dan rencana tersebut akan benar-benar dirasakan oleh mereka.
3. Pendidikan adalah faktor krusial dalam proses pembangunan. Tingkat pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran dalam berpartisipasi sebagai warga negara dan memudahkan dalam pengembangan identitas terhadap tujuan pembangunan nasional. Bahkan, pendidikan menjadi syarat untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang serta diiringi pengembangan nilai dan sikap, sehingga meningkatkan kualitas hidup sebagai bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan, memahami, serta merangkum berbagai situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah:

1. Studi Literatur
2. Observasi
3. Wawancara
4. Dokumentasi

### **Informan dan Teknik Pemilihan Informan**

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

Informan Kunci:

1. Masyarakat
2. Kepala UPT PPKBP3A Kecamatan Talun

Informan Pendukung:

1. Kepala Desa Kecomberan
2. Pegawai UPT PPKBP3A Kecamatan Talun
3. Bidan Desa

### **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode yang paling efektif untuk memverifikasi keabsahan data sebab melibatkan perbandingan (cek, periksa ulang, dan silang) berbagai sumber informasi yang didapat. Penulis mengaplikasikan teknik triangulasi dengan mengandalkan sumber karena ingin mengevaluasi dan memverifikasi tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara menyelidiki

secara mendalam informasi yang didapat dari informan dan hasil observasi. Proses ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengurangan data
2. Penyajian data
3. Verifikasi data
4. Penarikan kesimpulan

### **Objek Penelitian**

Desa Kecomberan adalah salah satu dari sebelas desa yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang terletak sejauh 300 meter ke arah timur dari pusat kecamatan. Desa ini memiliki luas area mencapai 120,6 hektar dengan total penduduk sebanyak 6.908 orang yang tersebar di tujuh wilayah RW.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon**

Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana sangat penting mengingat jumlah penduduk di Desa Kecomberan cukup besar. Saat ini, Desa Kecomberan telah memiliki partisipasi dalam program KB yang berjalan, tetapi masih belum maksimal. Ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang belum terlibat karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya program keluarga berencana (KB), juga terdapat kepercayaan tertentu yang menganggap bahwa program keluarga berencana adalah sesuatu yang haram, serta pola pikir yang beranggapan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki.

### **Masalah Kepemimpinan**

Dalam konteks kepemimpinan, kegiatan untuk mendorong partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Kepala UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kecamatan Talun dan Kepala Desa

Kecomberan. Mereka melakukan penyuluhan melalui PLKB dan TPD, tetapi untuk mendorong pegawai agar lebih aktif mengajak masyarakat, terutama di blok-blok belakang desa, mereka memberikan insentif. Meski demikian, insentif tersebut belum dapat menyempurnakan kinerja pegawai karena adanya keterbatasan dana.

### **Komunikasi**

Terkait dimensi komunikasi, PLKB, TPD, dan bidan desa telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui pendekatan langsung ke masyarakat, tetapi pemahaman masyarakat tentang informasi mengenai KB yang telah diberikan masih dianggap belum optimal.

### **Pendidikan**

Dalam dimensi pendidikan, sangat diperlukan adanya pendidikan yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB). Pendidikan nonformal yang diberikan kepada masyarakat tentunya berimbas pada pengetahuan mereka tentang program KB. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk berpartisipasi. Sementara itu, mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mengikuti pendapat orang lain.

### **Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon**

#### **Faktor Fanatisme Dalam Ajaran Agama**

Masih ada sebagian masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam program keluarga berencana karena tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa dua anak itu cukup, mereka lebih memilih untuk memiliki banyak anak. Sikap ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB).

### **Faktor Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan pemahaman yang belum mendalam mengenai program tersebut meski telah dilakukan penyuluhan dan informasi.

### **Faktor Anggaran**

Saat ini, pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan individu dengan cara door-to-door maupun penyuluhan kelompok yang diselenggarakan di satu lokasi masih terbatas. Untuk meningkatkan kinerja Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui insentif juga terhambat. Kendala ini terjadi karena dukungan anggaran dari pemerintah yang masih kurang.

### **Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon**

#### **Adanya Kerjasama Lintas Sektor**

Kerjasama antar berbagai sektor sangat diperlukan, mulai dari kecamatan, desa, hingga tokoh agama, karena semua pihak yang terlibat harus ikut serta dalam program keluarga berencana yang berkaitan dengan inisiatif pemerintah. Ini dilakukan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya ber-KB dan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk.

Sosialisasi diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam program keluarga berencana.

Dukungan dari pemerintah sangat penting dalam bentuk anggaran, baik yang ditujukan untuk pelatihan kader maupun untuk keperluan lainnya terkait dengan

pelaksanaan program keluarga berencana, agar program ini bisa berjalan sesuai harapan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sudah ada, namun tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya program keluarga berencana, adanya kepercayaan terhadap keyakinan tertentu, serta pola pikir yang berpandangan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, sehingga masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlibat. Secara umum, dimensi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB, karena mereka yang berpendidikan tinggi cenderung lebih sadar dan aktif, sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mengikuti arus.

### Saran

1. Mengadakan sosialisasi dalam bentuk kelompok di lokasi tertentu supaya masyarakat lebih tertarik untuk datang, dengan tujuan agar mereka bisa menerima informasi yang disampaikan.
2. Melakukan pendekatan yang intensif kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan para pengikut ajaran agama yang memiliki fanatisme agar dapat memahami dan mengerti program keluarga berencana secara mendalam, sehingga mereka termotivasi untuk mengambil bagian dalam program tersebut.
3. Perlu adanya dukungan dana dari pemerintah, karena hal ini akan mempermudah pelaksanaan program keluarga berencana.

## DAFTAR PUSTAKA

REFORMASI Vol 6 No 2 April 2022

- Aidi, Yusuf Zainal dan Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Basrowi, et.al. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saifuddin, Abdul Bari dkk. (Ed.). 2012. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyawati, Ari. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Theresia, Aprillia, et.al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, dan M. Makmur. 2015. Jurnal Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya

Jaya Saputra, Handy. 2015. Jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari). Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Shalfiah, Ramandita. 2013. Jurnal Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang. Ilmu Pemerintahan. Fisip Universitas Mulawarman

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> Diakses 2 Februari 2018

<http://pkbijateng.or.id/mengenal-jenis-kontrasepsi/> Diakses 13 Maret 2018

<http://jatim.bkkbn.go.id/category/alkon/> Diakses 17 Maret 2018